

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir, regulator dan lembaga penegak hukum telah menjadikan masalah Kecurangan Laporan Keuangan (KLK) sebagai salah satu topik yang diangkat secara global. Fenomena *fraud* secara global telah menyebabkan negara, pemerintah dan perusahaan menanggung biaya kerugian yang tinggi. Secara global, *fraud* menelan biaya kerugian triliunan setiap tahunnya (Zahari et al., 2022). Masalah ini terus merugikan berbagai pihak kepentingan seperti investor, kreditur dan masyarakat yang secara keseluruhan mempunyai dampak besar pada mereka semua. Adanya dampak buruk ini mewajibkan perseroan serta kredibilitas bagi auditor dan akuntan supaya menggali lebih lanjut terkait aspek pendorong kecurangan sehingga mampu meminimalisir dan menutup peluang terjadinya KLK (Omar et al., 2017).

Penting untuk mendeteksi kecurangan pada tahap awal, pihak manajemen dituntut untuk menyajikan dan mempublikasikan *annual report* sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam penggunaan sumber daya yang disediakan (Ozcelik, 2020). Selain itu, laporan keuangan bermanfaat untuk sumber komunikasi antara pihak-pihak perusahaan, termasuk pihak internal dan eksternal, sehubungan dengan kegiatan ekonomi perusahaan dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada penggunanya. Laporan keuangan menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif untuk membantu para pemakai membuat keputusan keuangan (Diansari & Wijaya, 2019).

Untuk memandu pengambilan keputusan yang baik, informasi keuangan harus tepat, relevan dan bebas dari kesalahan dan penipuan akan tetapi dengan adanya persaingan memungkinkan individu melakukan kecurangan dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan dalam upaya menyesatkan pengguna (Demetriades & Owusu Agyei, 2022). Selain itu, dengan adanya evaluasi hasil kinerja memicu pihak manajemen untuk mengelola kegiatan bisnis perusahaan secara optimal sehingga pihak manajemen mampu mencapai hasil yang memuaskan. Perseroan

yang bisa mencapai hasil yang memuaskan akan ditanggapi secara positif oleh calon investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lainnya. Namun tidak selalu pihak manajemen mampu memperoleh kinerja yang baik, kondisi ini menghasilkan laporan keuangan dengan informasi yang tidak diinginkan oleh calon investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kondisi seperti ini lah menjadikan pihak manajemen melakukan praktik kecurangan laporan keuangan (Priswita & Taqwa, 2019).

Kecurangan manajemen diartikan sebagai kegiatan terencana yang bertujuan untuk mengelabui serta mengecoh para pengguna laporan keuangan seperti calon investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Pihak manajemen mengecoh para pengguna laporan keuangan dengan cara menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan dengan salah saji secara material (Zhu & Gao, 2011). Praktik kecurangan laporan keuangan juga marak terjadi di Indonesia, Kasus ini terjadi akibat adanya persetujuan diantara dua pihak atau lebih dalam melangsungkan praktik kecurangan seperti mengecoh pihak ketiga dari hak-haknya (Vousinas, 2019). Berdasarkan laporan nasional terkait kecurangan ditahun 2022 oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengungkapkan dari 23 kasus kecurangan di negara Asia Pasifik, Indonesia berada diperingkat ke 6 dari 18 negara (ACFE 2022).

Salah satu praktik KLIK diindustri keuangan yaitu peristiwa yang terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Bank Bukopin pada tahun 2018 terbukti telah memanipulasi laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2015, 2016, dan 2017. PT BBKP tbk memanipulasi laporan keuangan dengan cara melakukan perbaikan penyusunan laporan keuangan di tahun 2016. Perbaikan ini menjadikan PT BBKP tbk mencatat laba bersih di tahun 2016 meningkat sebesar 13,13 % dari periode sebelumnya. Padahal, faktanya laba bersih PT BBKP tbk ditahun 2016 tercatat turun tajam sebesar 81 % dibandingkan laba bersih diperiode sebelumnya (CNBC Indonesia, 2018).

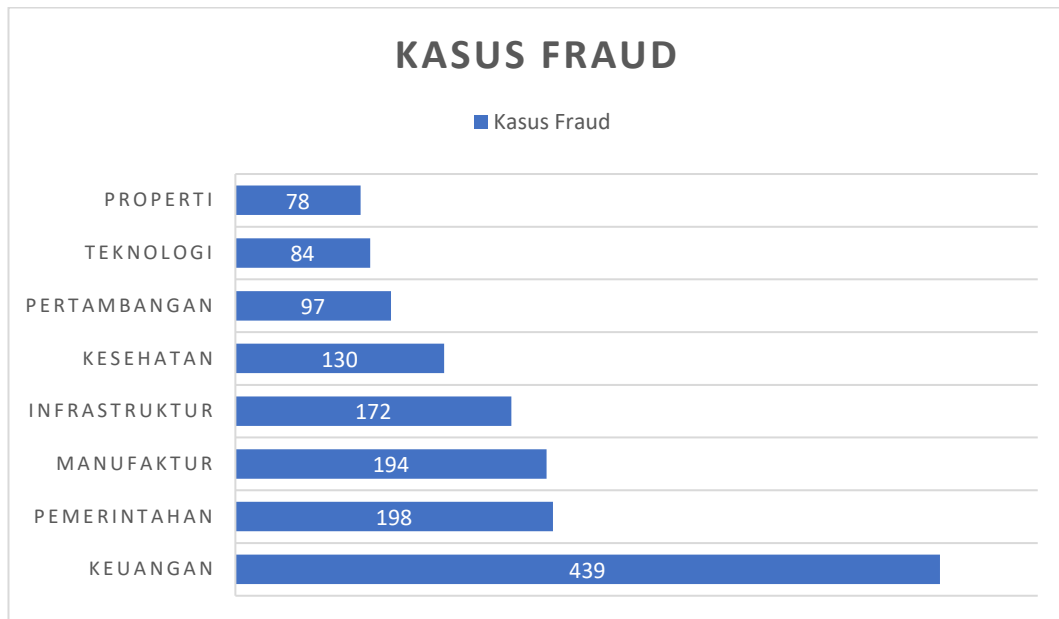
Tak hanya ditahun 2016, pada tahun 2017 PT BBKP tbk juga melakukan perubahan angka pada beberapa akun yakni pada akun pendapatan provisi dan komisi, pendapatan bunga dan syariah bersih serta pada akun beban penyisihan

kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Perubahan angka pada beberapa akun tersebut menjadikan beban perusahaan meningkat menjadi Rp 148,6 miliar. Semua perubahan tersebut juga menjadikan PT BBKP Tbk mencatat laba operasional bank sebesar Rp 1,39 triliun yang faktanya hanya memperoleh sebesar Rp 476,57 miliar (CNBC Indonesia, 2018).

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk juga terlibat kasus KLIK ditahun 2018. Kasus kecurangan ini melibatkan direktur utama PT. BTN Tbk yang terbukti melakukan perubahan angka pada laporan keuangan pada penjualan kredit bermasalah kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA), memberikan kredit ditahap pertama sebesar Rp 100 miliar yang tidak sesuai peruntukannya dan adanya penambahan kredit kepada PT Batam Isldan Marina (BIM) senilai Rp 200 miliar (Kompas, 2020).

Selain PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Asuransi Jiwasraya Tbk menjadi sorotan masyarakat di Indonesia karena juga terlibat praktik kecurangan laporan keuangan. Perusahaan ini merupakan asuransi milik BUMN tertua dan terbesar di Indonesia. Kasus ini terkuak dari terjadinya tekanan likuiditas yang berujung pada ketidakmampuan perusahaan ini dalam membayar polis asuransi (gagal bayar) *JS Saving Plan* dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun (Okezone, 2020).

BPK mengesahkan terkait kasus kecurangan PT Asuransi Jiwasraya Tbk pada tanggal 8 Januari 2020. Terungkapnya kasus ditahun 2006 yakni laba perusahaan dikatakan semu yang merupakan hasil manipulasi akuntansi. Selain itu, ditahun 2017 perusahaan mendapatkan opini tidak wajar, karena laba bersih tercatat sebesar Rp 360,3 miliar yang mana adanya pengurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Jika pencadangan dicatat dengan keadaan yang sebenarnya seharusnya perusahaan mengalami kerugian (Okezone, 2020). Di tahun 2022, ACFE mengungkapkan perusahaan yang bergerak di industri keuangan memiliki peristiwa kecurangan yang paling banyak dibandingkan industri lain (ACFE, 2022).



Gambar 1.1 Jumlah Kasus *Fraud*
Sumber: ACFE (2022)

ACFE mengelompokkan kecurangan terbagi menjadi tiga bagian yakni, penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*), korupsi (*corruption*) dan kecurangan laporan keuangan (*financial fraudulent reporting*).

Kategori <i>Fraud</i>	Persentase Kasus	Rata-Rata Kerugian
Penyalahgunaan Aset	9%	\$100.000
Korupsi	50%	\$150.000
Kecurangan Laporan Keuangan	9%	\$593.000

Tabel 1.1 Kategori *Fraud*
Sumber: ACFE (2022)

Dari survei diatas, kecurangan laporan keuangan sebagai kasus kecurangan yang memiliki kasus paling rendah diantara kelompok kecurangan. Kasus kecurangan laporan keuangan sebanyak 9 % yang merupakan angka paling kecil diantara kasus penyalahgunaan aset dan korupsi. Meskipun tingkat kecurangan laporan keuangan tergolong rendah namun mencapai kerugian yang terbesar diantara jenis kecurangan lainnya yaitu sebesar US\$ 593.000. Selain itu, (ACFE, 2022) juga menemukan rata-rata kerugian akibat *fraud* selama satu bulan dan ditemukan bahwa kecurangan laporan keuangan menduduki peringkat pertama dari pada tindakan kecurangan lainnya.

Fraud	Rata-Rata Kerugian selama 1 Bulan
<i>Financial Fraudulent Reporting</i>	\$32.900
<i>Corruption</i>	\$12.500
<i>Noncash</i>	\$6.500
<i>Check And Payment Tampering</i>	\$5.600
<i>Billing</i>	\$5.600
<i>Cash Larceny</i>	\$3.200
<i>Skimming</i>	\$3.100
<i>Payroll</i>	\$2.500
<i>Expense Reimbursements</i>	\$2.200
<i>Cash On Hand</i>	\$1.300
<i>Register Disbursements</i>	\$800

Tabel 1.2 Kerugian *Fraud* per Bulan

Sumber: ACFE (2022)

Fenomena *fraud* secara global telah menyebabkan negara, pemerintah dan perusahaan menanggung biaya kerugian yang tinggi. Bahkan secara global, *fraud* menelan biaya kerugian triliunan setiap tahunnya terutama kecurangan laporan keuangan (Zahari et al., 2022). Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan yang tinggi terkait penelitian lebih lanjut dibidang ini. Terutama dalam menemukan aspek dan unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian ini, menggunakan perspektif teori *fraud hexagon* untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya KLK yang terdiri dari enam elemen yaitu *stimulus*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *ego* dan *collusion*. Georgios L, Vousinas (2019) menyebutkan bahwa teori tentang faktor pendorong *fraud* perlu diperbarui untuk beradaptasi dengan kasus *fraud* yang terus berkembang.

Stimulus atau tekanan merupakan elemen pertama dalam teori *fraud hexagon* yang diartikan sebagai dorongan untuk melakukan *fraud* dan bersifat *finansial* dan non *finansial* (Vousinas, 2019). Berdasarkan ACFE di tahun 2022 mengungkapkan bahwa stimulus atau tekanan yang berlebihan merupakan salah satu tanda memicu terjadinya KLK. Pada tahun 2016, 2018 dan 2020 ACFE mencatat kasus yang terjadi akibat adanya tekanan ialah sebesar 7 %, sementara itu

ditahun 2022 sebesar 13 %. Adanya peningkatan kasus ditahun 2022 ini menandakan bahwa tekanan berlebihan mendorong terjadinya praktik KLK (ACFE, 2022).

Stimulus memiliki tiga dimensi yaitu *financial stability*, *financial target* dan *external pressure* (Skousen et al., 2009). Dimensi pertama ialah *financial stability* yang diartikan sebagai kondisi perusahaan yang mempunyai keuangan yang stabil (Skousen et al., 2009). Berdasarkan (Bawekes et al., 2018) dan (Aviantara, 2021) dan menemukan bahwa *financial stability* sebagai proksi *stimulus* berpengaruh positif terhadap KLK dan mendukung pernyataan jika pihak manajemen tidak mampu mempertahankan *financialnya* secara stabil maka akan menimbulkan tekanan tinggi bagi pihak manajemen untuk menyembunyikan keadaan tersebut dengan cara melakukan KLK (Bawekes et al., 2018).

Dimensi kedua yaitu *financial target* yang diartikan sebagai tekanan ekstrim pada pihak yang bertanggungjawab dalam mencapai tolok ukur keuangan yang telah ditetapkan oleh eksekutif (Demetriades & Owusu Agyei, 2022). *Financial target* diukur menggunakan ROA dalam mengukur kinerja operasional perusahaan, jika ROA yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan semakin tinggi menyebabkan menimbulkan stimulus yang berlebihan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk menyembunyikan keadaan tersebut dengan cara melakukan KLK (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021). Hal ini didukung oleh (Demetriades & Owusu Agyei, 2022), (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021) dan (Soelung et al., 2021) yang menemukan bahwa *financial target* mampu mendorong potensi terjadinya KLK.

Dimensi ketiga dari *stimulus* yaitu *external pressure* yang diartikan sebagai tekanan yang diberikan kepada manajemen secara berlebihan guna untuk mencapai keuntungan bagi pihak yang berkepentingan atau pihak ketiga (Skousen et al., 2009). *External pressure* bersumber dari adanya tuntutan pihak manajemen untuk menyajikan laporan keuangan wajar agar memperoleh tambahan dana dari pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan tekanan yang tinggi pada pihak manajemen, akibatnya memotivasi pihak manajemen untuk melakukan KLK agar mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak ketiga seperti investor, kreditor dan para pemangku kepentingan lainnya (Imtikhani & Sukirman, 2021). Hal ini didukung

oleh (Puspitha et al., 2018) dan (Achmad et al., 2023) yang menemukan bahwa *external pressure* sebagai proksi *stimulus* memicu potensi KLK.

Elemen kedua dari teori *fraud hexagon* ialah *opportunity* yang diartikan sebagai peluang yang memungkinkan terjadinya suatu *fraud* (Apriliana & Agustina, 2017). *Opportunity* didimensi dengan *ineffective monitoring* yang memiliki kondisi yang mana perusahaan tidak memiliki dewan komisaris atau pengawasan komite yang tidak efektif (Skousen et al., 2009). *Public Company Accounting Oversight board* (2017) mengungkapkan bahwa *opportunity* terjadi akibat adanya andil dari dewan komisaris atas ketidakefektifan pengawasan. Seperti kasus PT Asabri Tbk yang bergerak dibidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun yang merugikan negara hingga Rp 23 triliun. Praktik kecurangan ini terjadi akibat lemahnya tata kelola perusahaan terutama lemahnya fungsi pengawasan dari *board commisioners* pada PT. Asabri Tbk sehingga menjadikan kondisi tersebut membuka peluang untuk melakukan kecurangan (Sindonews.com, 2021).

Dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan bisnis perusahaan sehingga dewan komisaris berkewajiban dalam melakukan pemantauan setiap kegiatan operasional perusahaan. Supaya efektifnya pemantauan dan meminimalisir peluang kecurangan dikegiatan proses bisnis maka dibutuhkanlah peran *board independent commisioners*. *Board independent commisioners* ini berasal dari luar perusahaan yang nantinya mampu meminimalisir potensi kecurangan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021). Hal ini didukung oleh (Meidijati & Amin, 2022), (Akbar et al., 2022) dan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021) yang menunjukkan bahwa *opportunity* yang didimensi dengan *ineffective monitoring* mendorong terjadinya KLK.

Elemen ketiga dari teori *fraud hexagon* ialah *rationalization* yang diartikan membenarkan perilaku kecurangan (Vousinas, 2019). Dalam penelitian ini *rationalization* didimensi oleh *auditor change* (Skousen et al., 2009). Adanya keterlibatan auditor dalam melakukan praktik KLK. Seperti kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Tbk, dalam kasus ini, PT SNP Tbk, AP Marlinna dan Merliyana Syamsyul serta KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan bekerja sama untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga

menyesatkan para pengguna laporan keuangan (Hukum online.com, 2018). *Auditor change* yang dilakukan perusahaan sebagai upaya menutupi jejak audit sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rizkiawan, 2022) dan (Purnama et al., 2022) menemukan bahwa perusahaan yang diindikasikan melakukan KLK dapat dilihat dari seberapa sering perusahaan melakukan perubahan auditornya.

Elemen keempat dari teori *fraud hexagon* ialah *capability* yang diartikan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan pelanggaran baik secara individu maupun secara berkelompok. Para karyawan memiliki keahlian dalam membobol sistem pengendalian internal dan menutupi kecurangan tanpa terdeteksi (Skousen et al., 2009). *Capability* mendorong terjadinya kecurangan seperti dalam kasus penyeludupan PT Garuda Indonesia Tbk oleh direktur utamanya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra memiliki kemampuan yang tinggi dengan latar pendidikan S2. Selain itu, kasus Jiwasraya yang menjadi salah satu tersangkanya adalah eks direktur utama Hendrisman Rahim yang juga memiliki latar pendidikan S2 (Kompas.com, 2020).

Dalam penelitian ini, *capability* didimensi dengan *change of director* dan *CEO's Education* (Skousen et al., 2009), (Larasati et al., 2020). *Change of director* sebagai dimensi pertama dari *capability* diartikan sebagai upaya menghilangkan jejak kecurangan atau *fraud trail* sehingga pergantian direksi dilakukan (Puspitha et al., 2018). Hal ini didukung oleh (Aviantara, 2021) dan (Demetriades & Owusu Agyei, 2022) menemukan bahwa perusahaan yang cenderung melakukan kecurangan laporan keuangan ialah perusahaan yang lebih sering melakukan pergantian dewan direksi.

CEO's Education sebagai dimensi kedua dari *capability* yang dapat dikatakan sebagai *capability* yang dimiliki seorang CEO berguna dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor (Preicilia et al., 2022). Berdasarkan (ACFE, 2022) menyatakan bahwa kasus *fraud* yang dilakukan oleh individu yang berlatarbelakang S2 dan S3 mengakibatkan kerugian sebanyak \$150.000 dan \$135.000 sedangkan individu yang berlatar belakang S1 mengakibatkan kerugian \$115.000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CEO dengan latarbelakang pendidikan dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih

cenderung melakukan praktik kecurangan. Hal ini didukung oleh (Jannah, 2018) menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang CEO atau direksi maka semakin tinggi potensi terjadinya KLK.

Elemen kelima dari teori *fraud hexagon* ialah *ego* yang diartikan sebagai sikap sombong yang ada dalam diri seseorang yang beranggapan bahwa dirinya mampu untuk melakukan suatu kecurangan (Putriyanti & Cahyati, 2020). Dalam penelitian ini *ego* didimensi dengan *CEO duality* (Preicilia et al., 2022). Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki *CEO duality* yaitu seorang direksi yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih dari satu kedudukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan (Natalia et al., 2021).

Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mengungkapkan bahwa perilaku kecurangan berasal dari karakteristik yang memadukan antara tekanan dan *ego* sebanyak 70% dan COSO juga mencatat bahwa fenomena kecurangan sebanyak 89% melibatkan CEO. Hal ini didukung oleh (Meidijati & Amin, 2022) dan (Preicilia et al., 2022) yang menemukan bahwa semakin banyak jabatan yang dimiliki CEO atau direksi maka semakin besar potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Elemen keenam dari teori *fraud hexagon* ialah *collusion* diartikan sebagai persetujuan diantara dua pihak atau lebih dalam melangsungkan praktik kecurangan seperti mencurangi pihak ketiga dari hak-haknya (Vousinas, 2019). Kondisi ini sesuai dengan hasil RTTN tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa sebesar 51 % praktik kecurangan cenderung melibatkan dua atau lebih pihak yang berkolusi dalam melangsungkan kecurangan (ACFE, 2022). Dalam penelitian ini, *collusion* didimesi dengan *political connection* dan *state-owned enterprises* (Desviana et al., 2020) (Purnama et al., 2022). *Political connection* sebagai dimensi pertama dari *collusion* diartikan sebagai perusahaan yang mengusahakan hubungan dengan politisi atau pemerintahan (Larasati et al., 2020). Hal ini didukung oleh (Desviana et al., 2020), (Handoko, 2021) dan (Akbar et al., 2022) yang menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris yang memiliki *political connection* didalam perusahaan maka semakin tinggi peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Dimensi kedua ialah *state-owned enterprises* yang merupakan hak kepemilikan perusahaan secara keseluruhan maupun secara parsial dimiliki oleh pemerintah (Purnama et al., 2022). Berdasarkan ACFE (2022) menyatakan bahwa perusahaan *state-owned enterprises* mengakibatkan kerugian sebesar \$138,000 dengan kasus 18 % kasus. Hal ini didukung oleh (Purnama et al., 2022) dan (Aprilia et al., 2022) yang menemukan bahwa perusahaan yang tergolong *state-owned enterprise* memiliki potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak tergolong *state-owned enterprise*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menguji kemampuan Vousinas *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Georgios L, Vousinas (2019) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Georgios L, Vousinas (2019) menyebutkan bahwa teori tentang faktor pendorong *fraud* perlu diperbarui untuk beradaptasi dengan kasus *fraud* yang terus berkembang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menggunakan dimensi yang lebih komprehensif pada masing-masing elemen *fraud hexagon* sehingga penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas.

Pada elemen pertama peneliti menggunakan tiga dimensi pada stimulus yaitu *financial stability*, *financial target*, dan *external pressure*. *Opportunity* sebagai elemen kedua didimensi dengan *ineffective monitoring*. *Rationalization* sebagai elemen ke tiga didimensi oleh *auditor*. Elemen keempat ialah *capability* didimensi dengan *change of director* dan *CEO's Education*. Elemen kelima ialah ego didimensi dengan *CEO duality*. Elemen keenam ialah *collusion* didimesi dengan *political connection* dan *state-owned enterprises*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk **Menganalisis Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Teori *Fraud Hexagon*** (Pada Industri Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *stimulus* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *capability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
5. Apakah ego berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
6. Apakah *collusion* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang ingin di jawab, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan memverifikasi *stimulus* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
2. Untuk membuktikan dan memverifikasi *opportunity* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
3. Untuk membuktikan dan memverifikasi *rationalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
4. Untuk membuktikan dan memverifikasi *capability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
5. Untuk membuktikan dan memverifikasi ego berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
6. Untuk membuktikan dan memverifikasi *collusion* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi serta memberi kontribusi sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait penggunaan dimensi pada teori *fraud hexagon*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pihak perusahaan, guna memperbanyak ilmu pengetahuan pihak perseroan seperti mengetahui lebih lanjut aspek atau unsur yang mempengaruhi terjadinya kasus *fraud* dalam perseroan. Hal ini sebagai rujukan dalam usaha memperkuat sistem kontrol perusahaan sehingga mampu meminimalisir dan menutup peluang melangsungkan kecurangan.

3. Bagi Investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menganalisis investasinya di suatu perusahaan agar dapat menilai dan berhati-hati serta mendeteksi dengan cara menganalisis lebih lanjut terkait dimensi pada teori *fraud hexagon* didalam penelitian ini yang memicu terjadinya KLK sehingga dapat meminimalisir resiko dalam investasinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berkontribusi memperkaya informasi untuk penelitian mendatang dan pembeding untuk ilmu pengetahuan serta perbaikan dalam penelitian selanjutnya dimasa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Selanjutnya, bab dua menjelaskan mengenai landasan teori, tinjauan literatur, tinjauan kajian terdahulu dan pengembangan hipotesis serta dilengkapi dengan kerangka konseptual penelitian. Pada bagian bab tiga menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dilanjutkan dengan metode analisis data. Pada bab ke empat, menguraikan tentang pengujian atas hipotesis dan hasil-hasil pengolahan data penelitian, sekaligus pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori. Pada bab lima menyajikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan dan saran untuk penelitian ini.

